## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran Kode No.

Nomor

: SPD/ 104 /X/KA/RH.00/2023/BNNP

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi. Psikolog	
		NIP. 19930124 2020 12 1006	
3	a. Golongan	a. III - a b. Psikolog Klinis Ahli Pertama	
	b. Jabatan / Instansi		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	on one of the ordina	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6 a. Tempat berangkat a. Mataram			
	b. Tempat tujuan	b. Lombok Timur	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. Selama 1 (Satu) hari kerja terhitung mulai tanggal :	
b. Tanggal berangkat b. 16 Oktober 2023			
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 16 Oktober 2023	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	Hijabul Insan, A.Md. Kep		1/
	2	Int c	
	3 4		
	5		- 4/
9	Pembebanan Anggaran	The state of the s	
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	3260.BDB.001.055.A.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di: Mataram

tanggal : Oktober 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

		Berangkat (ari : Mataram (Tempat Keludukan) Ke : Lombok Timur Pada Tangga : 16 Oktober 2023 Kepala Badan Narketika Nasional Provinsi Kusa Tenggara Barat	
		Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	
II.	Tiba di : Lombok Timur Pada Tanggal : 16 Oktober 2023	Berangkat dari : Lombok Timur  Ke : Mataram  Pada Tanggal : 16 Oktober 2023	
III.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :	
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :	
Pada Tangkall : 16 Oktober 2022 perjalanan tersebut atas perintahnya di		perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yan sesingkat-singkatnya.	
	Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	Fajrul Husni, SE	

VI. Catatan Lain-lain

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.